

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R DI KALURAHAN CONDONGCATUR

Irfani Reza Pahlevi¹ Sugiyanto²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: irfanirezapahlevi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-01

Revised:

2025-10-09

Accepted:

2025-10-28

Abstract: The waste problem is an increasingly complex environmental issue along with population growth, urbanization, and increased socio-economic activities of the community. Sleman Regency responded to this problem through Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Management of Household Waste and Household-Like Waste which emphasizes the principles of reduction, reuse, and recycling (3R). This study aims to analyze the implementation of Sleman Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning 3R-based waste management in Condongcatut Village. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants include village officials, 3R TPS managers, waste bank administrators, and the community. Data analysis was conducted using the George C. Edward III policy implementation model which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the 3R-based waste management policy in Condongcatut Village has been running through a household waste sorting program, waste banks, and 3R TPS management. However, implementation has not been fully optimized due to differences in community participation levels across hamlets, limited infrastructure, and weak waste management institutions. This study concludes that the success of policy implementation is greatly influenced by resource support, effective communication, and strengthening of community-based institutions.

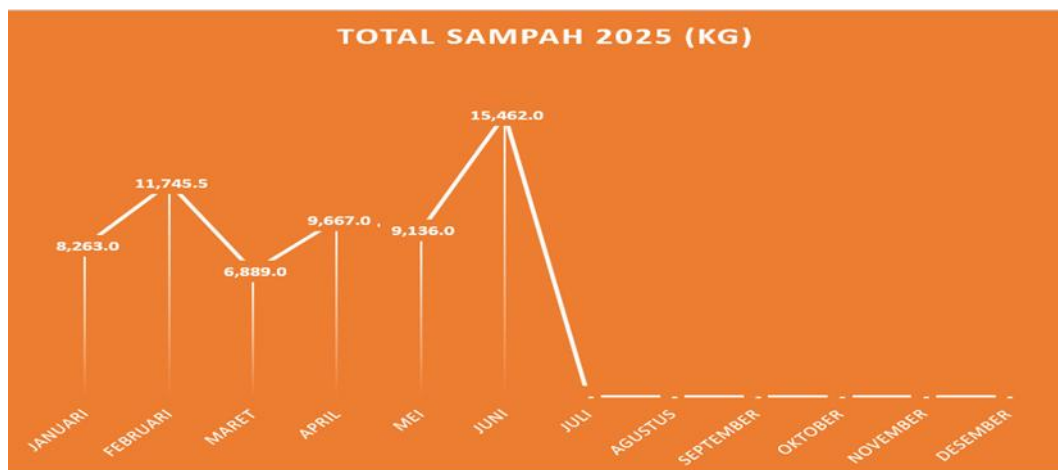
Keywords: Policy implementation, waste management, 3R, community participation, Condongcatut Village

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga menurunnya kualitas estetika wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak di setiap daerah khususnya di Kalurahan Condongcatut Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta[1].

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu pusat pendidikan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Peningkatan mobilitas penduduk, aktivitas mahasiswa, serta sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya volume dan kompleksitas sampah yang dihasilkan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DIY menunjukkan bahwa volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sarana pendukung lainnya semakin terbatas [2]. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan sampah yang tidak lagi berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi menekankan pengurangan sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah berbasis 3R dinilai efektif dalam menekan timbulan sampah dari sumber serta mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup berkelanjutan [3].

Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di DIY, menjadi salah satu penyumbang utama timbulan sampah regional. Posisi Kabupaten Sleman sebagai kawasan permukiman padat, pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa menyebabkan produksi sampah rumah tangga maupun non rumah yang relatif tinggi. Jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kondisi ini berpotensi menambah beban lingkungan dan mempercepat krisis kapasitas TPA. Dengan kondisi demikian, diperlukan strategi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar perkembangan wilayah dapat tetap berjalan seiring dengan terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan [4].



Gambar Grafik Volume Produksi Sampah Harian (kg) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2025, volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis pada enam bulan pertama. Pada bulan Januari tercatat total sampah sebesar 8.263 kilogram, kemudian meningkat tajam pada Februari menjadi 11.745,5 kilogram. Namun, tren tersebut tidak bertahan lama karena pada bulan Maret jumlah sampah justru menurun cukup signifikan hingga mencapai 6.889 kilogram. Memasuki April, volume sampah kembali naik menjadi 9.667 kilogram dan sedikit menurun pada Mei dengan catatan 9.136 kilogram. Lonjakan terbesar terjadi pada Juni, di mana volume sampah mencapai 15.462 kilogram, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam periode semester pertama. Sementara itu, data untuk bulan Juli hingga Desember belum tersedia dalam grafik sehingga perkembangan tren pada paruh kedua tahun masih belum dapat diketahui [5].

Fenomena ini mencerminkan kompleksitas persoalan sampah di DIY, yang tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan tingginya aktivitas pariwisata. Jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan sampah yang efektif, kondisi ini berpotensi menambah beban TPA yang sudah semakin

terbatas kapasitasnya. Karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Kalurahan Condongcatur, terletak di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, yang merupakan wilayah padat penduduk dan berkembang pesat sebagai kawasan pendidikan dan permukiman. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya timbunan sampah rumah tangga maupun non-rumah tangga. Pemerintah Kalurahan Condongcatur bersama dengan Pemerintah Daerah telah berupaya menjalankan berbagai kebijakan pengelolaan sampah, seperti program *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), pembentukan bank sampah, pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan.

Secara substansi, peraturan daerah kabupaten sleman memiliki prinsip pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali (*reuse*), serta pendauran ulang (*recycle*). Sedangkan penanganan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga [6] mengamanatkan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dalam mendukung pengelolaan sampah, tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Condongcatur dalam memilah sampah rumah tangga merupakan wujud nyata implementasi dari semangat Peraturan Daerah ini. Keberhasilan kebijakan lingkungan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program [7].

Pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 [6] tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan peran serta aktif masyarakat. Regulasi ini menekankan tiga pendekatan utama, yakni pengurangan sampah (melalui 3R: *reduce, reuse, recycle*) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).

Bagi Kalurahan Condongcatur, Perda Nomor 4 Tahun 2015 [6] menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pembentukan bank sampah, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta kegiatan edukasi lingkungan di tingkat padukuhan kalurahan condongcatur. Implementasi regulasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan bank sampah, pengembangan TPS/TPST 3R, serta kegiatan edukasi lingkungan di tingkat padukuhan, namun data dan temuan lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat antar padukuhan dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya merata dan optimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Data tindak lanjut menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat antar-padukuhan dalam memilah sampah. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi Perda di tingkat kalurahan sudah berjalan, namun belum merata dalam hal capaian maupun efektivitas. Kondisi Condongcatur yang menjadi kawasan padat penduduk, pusat kegiatan mahasiswa, serta wilayah dengan pertumbuhan perumahan dan pusat bisnis yang pesat menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengendalikan timbunan sampah. Karakteristik sampah yang dihasilkan pun beragam, mulai dari sampah organik rumah tangga, sampah anorganik, hingga sampah khusus seperti limbah elektronik dan plastik sekali pakai.

Upaya pengelolaan sampah di Condongcatur sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, komunitas lingkungan, dan institusi

pendidikan. Program bank sampah, misalnya, menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi tambahan. Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan sampah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat [8]. Namun, permasalahan keberlanjutan program sering muncul karena kurangnya konsistensi partisipasi warga. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan program-program tersebut.

Selain partisipasi masyarakat, faktor sarana dan prasarana juga menjadi penentu keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Keterbatasan armada pengangkut sampah, kapasitas tempat pengolahan, serta belum meratanya fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Evaluasi yang menyeluruh akan membantu mengidentifikasi celah-celah yang masih perlu diperbaiki, termasuk kebutuhan investasi sarana baru maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola sampah.

Keberadaan TPS 3R seperti KPP Kenanga menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan program. Namun, keberhasilan TPS 3R tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, melainkan juga oleh manajemen kelembagaan, kesinambungan pendanaan, serta tingkat keterlibatan warga. Beberapa TPS 3R mampu berjalan baik karena didukung partisipasi masyarakat dan jejaring kemitraan, tetapi ada juga yang kesulitan dalam operasional karena terbatasnya sumber daya manusia dan biaya operasional.

Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya koordinasi antar-stakeholder, serta tantangan dalam keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini menuntut adanya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, guna mengetahui sejauh mana program-program tersebut berjalan sesuai tujuan, apa saja faktor pendukung maupun penghambatnya, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di wilayah Condongcatur.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Condongcatur memperlihatkan bahwa Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 telah diimplementasikan melalui berbagai program berbasis masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan partisipasi antar-padukuhan, keterbatasan sarana, dan keberlanjutan program. Implementasi ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana regulasi daerah tersebut mampu mencapai tujuan utamanya: mengurangi timbunan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan seperti Condongcatur.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Condongcatur penting dilakukan untuk mengetahui relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal masyarakat. Hasil implementasi dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program yang telah berjalan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis sebagai kontribusi dalam kajian kebijakan publik, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan kalurahan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur. Penelitian kualitatif dipahami sebagai metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme, meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, analisis induktif, serta menekankan makna

dibandingkan generalisasi [9]. Sifat deskriptif berarti penelitian berfokus pada penggambaran kondisi, proses, dan fenomena secara rinci dan utuh.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan jumlah penduduk yang besar, tingkat kepadatan tinggi, serta adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat antar-padukuhan dalam pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menjadikan Condongcatur sebagai lokasi yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Subjek penelitian melibatkan berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan sampah, meliputi perangkat pemerintah kalurahan, para dukuh, pengurus bidang lingkungan, pengelola TPS 3R dan bank sampah, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Selain itu, penelitian juga melibatkan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan DIY untuk memperoleh perspektif kebijakan yang lebih luas. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* [10], berdasarkan keterlibatan, peran, dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sampah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang digunakan untuk menggali praktik implementasi kebijakan, peran aktor, tingkat partisipasi masyarakat, serta kendala dan faktor pendukung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, arsip kelembagaan, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah, yang berfungsi sebagai landasan teoritis, kontekstual, dan pembanding terhadap temuan lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap perangkat kalurahan, pengelola TPS 3R, pengurus bank sampah, kepala dukuh, serta warga yang terlibat dalam pemilahan sampah. Observasi digunakan untuk mengamati langsung proses pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga hingga TPS 3R. Dokumentasi meliputi foto kegiatan, arsip administrasi, dan catatan operasional yang mendukung data penelitian.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif model Miles dan Huberman dalam buku ahmad rijali [11], melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang terkumpul diseleksi dan disederhanakan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan, sebelum diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka teori Edward III dan Dunn. Kesimpulan diverifikasi secara berkelanjutan melalui triangulasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas data, dengan membandingkan informasi dari pemerintah kalurahan, pengelola TPS 3R dan bank sampah, serta masyarakat. Perbandingan antar-sumber ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif dan akurat mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur, sekaligus memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian [12].

Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III [14] yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta evaluasi kebijakan William N. Dunn yang menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area perbaikan [13]. Analisis menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kalurahan Condongcatur telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk sosialisasi, seperti pertemuan warga, kegiatan padukuhan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal. Namun, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya merata, sehingga tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pemilahan sampah masih bervariasi antar padukuhan. Dari sisi sumber daya, struktur pelaksana

kebijakan telah terbentuk dan melibatkan pemerintah kalurahan serta berbagai kelembagaan pengelola sampah, tetapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor yang membatasi optimalisasi implementasi kebijakan di seluruh wilayah. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik [15].

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kalurahan Condongcatur dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur telah diimplementasikan melalui berbagai program berbasis masyarakat, seperti pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, dan pengelolaan TPS 3R. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan padukuhan, dan dukungan tokoh Masyarakat, namun efektivitas komunikasi kebijakan masih belum merata, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pemilahan sampah berbeda antar-padukuhan. Pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 yang menekankan pengurangan sampah melalui prinsip 3R dan pemilahan dari sumber. Sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas permukiman, pendidikan, serta perdagangan yang intensif, pengelolaan sampah menjadi isu strategis yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan koordinasi lintas aktor. Secara operasional, pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan di tingkat rumah tangga, pengelolaan bank sampah, pengangkutan oleh padukuhan, pengolahan di TPS 3R, serta pembuangan residu ke TPA Piyungan melalui sistem kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Condongcatur telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah kalurahan bersama dukuh dan kelompok pengelola sampah berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pembentukan kelembagaan, serta penyediaan layanan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi antar padukuhan, yang dipengaruhi oleh perbedaan komitmen pelaksana, keterbatasan sarana prasarana, dan belum meratanya akses layanan pengangkutan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edward III, faktor komunikasi telah berjalan melalui sosialisasi, edukasi, dan peran tokoh masyarakat, namun belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Akibatnya, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan masih berbeda antar padukuhan. Dari sisi sumber daya, struktur pelaksana sudah terbentuk, tetapi kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana masih terbatas, sehingga memengaruhi efektivitas dan pemerataan implementasi kebijakan.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, konsistensi sikap dan tanggung jawab di tingkat pelaksana lapangan masih bervariasi, yang berdampak pada keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah. Sementara itu, struktur birokrasi pengelolaan sampah telah terbentuk secara fungsional melalui peran pemerintah kalurahan, JPSM, KPSM, bank sampah, dan TPS 3R. Kelembagaan lokal berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan formal pemerintah dan praktik sosial masyarakat dalam implementasi kebijakan publik [16]. Kendati demikian, ketiadaan SOP tertulis menyebabkan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kesepakatan dan inisiatif lokal, sehingga tingkat konsistensi antar wilayah belum seragam.

Analisis kebijakan menggunakan teori model William N. Dunn [17] menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Condongcatur relatif efektif dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat, terutama melalui pemilahan dari rumah, bank sampah, dan TPS 3R. Namun, dampak pengurangan volume sampah belum merata di seluruh padukuhan. Dari sisi efisiensi, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menyebabkan penggunaan sumber daya belum optimal. Aspek kecukupan menunjukkan bahwa kebijakan cukup membantu mengatasi persoalan sampah, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Responsivitas kebijakan dinilai cukup baik karena membuka ruang partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi. Dari aspek ketepatan, kebijakan dinilai sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat Condongcatur yang berbasis gotong royong dan kelembagaan lokal.

Analisis partisipasi masyarakat berdasarkan teori Arnstein [18] menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada level *partnership*. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi terlibat aktif dalam pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta kegiatan TPS 3R bersama pemerintah kalurahan. Hubungan kemitraan ini mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab yang relatif seimbang, meskipun kendali utama kebijakan masih berada pada pemerintah. Tingkat partisipasi tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur telah berjalan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, konsistensi pelaksana, serta kelembagaan formal agar implementasinya lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kalurahan Condongcatur

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian dan perbedaan antara kerangka teori implementasi kebijakan dengan temuan empirik di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat kalurahan.

Faktor pendukung, adanya regulasi yang jelas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Regulasi tersebut memberikan legitimasi, arah kebijakan, serta kepastian hukum bagi pemerintah kalurahan dan para pelaksana kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pentingnya kejelasan kebijakan dan aturan sebagai prasyarat keberhasilan implementasi. Di Kalurahan Condongcatur, regulasi formal tersebut menjadi dasar pembentukan kelembagaan pengelola sampah dan pelaksanaan program pemilahan serta pengolahan sampah di tingkat lokal. Faktor pendukung berikutnya adalah dukungan aktif dari pemerintah kalurahan. Berdasarkan temuan empirik, pemerintah kalurahan berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pembina dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, antara lain melalui pemberian dana stimulan, pendampingan kelembagaan, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring. Peran aktif pemerintah kalurahan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Edward III pada aspek disposisi pelaksana, di mana komitmen dan sikap aparatur berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Keberadaan kelembagaan pengelola sampah seperti bank sampah dan TPS 3R menjadi faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan. Kelembagaan ini berfungsi sebagai pelaksana teknis sekaligus wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein yang menempatkan masyarakat Condongcatur pada level *partnership*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan program. Penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat dalam implementasi

kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur. Salah satu faktor penghambat utama adalah partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh padukuhan. Meskipun sebagian masyarakat telah aktif terlibat dalam pemilahan sampah dan kegiatan bank sampah, masih terdapat wilayah dengan tingkat partisipasi yang rendah. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan teoritik mengenai partisipasi masyarakat yang merata dengan realitas empirik di lapangan.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Ketersediaan armada pengangkut, fasilitas pemilahan, serta peralatan pengolahan sampah di TPS 3R masih belum memadai untuk melayani seluruh wilayah kalurahan. Kondisi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan implementasi kebijakan dengan sumber daya yang tersedia, sebagaimana ditekankan dalam teori Edward III pada aspek sumber daya.

Koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur masih belum berjalan secara optimal. Lemahnya koordinasi antar aktor kebijakan sering menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan di tingkat lokal [19]. Meskipun berbagai kelembagaan pengelola sampah, seperti Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM), Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM), bank sampah, dan TPS 3R telah terbentuk dan berfungsi di tingkat lokal, pengelolaannya masih bersifat semi formal. Kondisi ini ditandai dengan belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara jelas mengatur pembagian peran, alur koordinasi, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi program. Ketidadaan SOP tertulis menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu yang memiliki komitmen tinggi. Akibatnya, tingkat konsistensi dan keberlanjutan program bervariasi antar wilayah dan belum sepenuhnya terjamin dalam jangka panjang. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah serta melemahkan koordinasi antar kelembagaan yang seharusnya saling mendukung.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep struktur birokrasi yang ideal sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan dengan praktik empirik di tingkat kalurahan. Secara teoritik, struktur birokrasi yang jelas dan terstandar menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, namun dalam praktik di Kalurahan Condongcatur, struktur yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus perbedaan antara teori dan temuan empirik. Faktor pendukung berperan dalam memperkuat implementasi kebijakan, sementara faktor penghambat menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui strategi penguatan kelembagaan dan koordinasi kebijakan di tingkat lokal.

Strategi yang dilakukan untuk memperkuat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Condongcatur Agar Lebih Optimal dan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta tingkat partisipasi masyarakat, diperlukan strategi penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Strategi ini penting untuk menjawab berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sarana prasarana, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh padukuhan.

1. Penguatan Strategi Komunikasi dan Edukasi Berkelanjutan

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah penguatan komunikasi dan edukasi kebijakan secara berkelanjutan. Edukasi lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah [20]. Pemerintah kalurahan perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah

tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi rutin, pelatihan, serta pemanfaatan peran tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal. Komunikasi kebijakan yang konsisten dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumber.

2. Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Pendukung

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama implementasi kebijakan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan dan pemerataan fasilitas pengelolaan sampah, seperti penambahan armada pengangkut, penyediaan fasilitas pemilahan di tingkat padukuhan, serta peralatan pendukung pengolahan sampah di TPS 3R. Pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan dana desa, kerja sama lintas sektor, maupun dukungan dari pihak swasta dan CSR.

3. Penguatan Kelembagaan dan Penyusunan SOP Tertulis

Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah memerlukan struktur organisasi yang lebih formal dan penciptaan *standar operasional prosedur* (SOP) tertulis untuk meningkatkan koordinasi antar aktor. Adanya SOP yang jelas, pelaksanaan kebijakan tidak lagi bergantung pada tindakan individu, tetapi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. SOP ini juga harus mengatur pembagian peran, alur koordinasi, mekanisme pelaksanaan, dan sistem monitoring dan evaluasi antara pemerintah kelurahan, JPSM, KPSM, bank sampah, dan TPS 3R.

4. Penguatan Kapasitas dan Insentif bagi Pelaksana

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan konsistensi sikap pelaksana. Pengelola sampah dan kader lingkungan memerlukan pelatihan teknis, manajemen kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, insentif baik finansial maupun non finansial, seperti penghargaan dan pengakuan sosial dapat membantu pelaksana lebih termotivasi dan tetap bekerja di tingkat lapangan.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Kemitraan

Pemerintah kalurahan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan teknis dan pengelolaan program, jika mereka ingin mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada level kolaborasi (Arnstein). Masyarakat tidak hanya berpartisipasi sebagai pelaksana, tetapi juga berpartisipasi sebagai mitra dalam perencanaan, evaluasi, dan pengembangan metode baru untuk mengelola sampah. Metode ini akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan.

6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan strategi lain yang penting. Pemerintah kalurahan, kelembagaan pengelola, dan perwakilan masyarakat harus melakukan evaluasi rutin terhadap pencapaian kebijakan, hambatan, dan kebutuhan perbaikan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan berjalan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Berdasarkan enam strategi penguatan yang telah dirumuskan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur memiliki peluang besar untuk ditingkatkan secara signifikan. Penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh padukuhan. Maka dari itu, dengan adanya penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, struktur kelembagaan, kapasitas pelaksana, serta sistem monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur diharapkan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan. Selain itu, strategi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi

dan kemitraan antara pemerintah kalurahan, kelembagaan pengelola sampah, dan masyarakat, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama yang berbasis pada partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Kebaruan (*novelty*) Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada temuan empiris mengenai praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat kalurahan yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan pertama adalah ditemukannya model jejaring pengelolaan sampah berbasis komunitas yang melibatkan pemerintah kalurahan, JPSM, KPSM, bank sampah, dan TPS 3R dalam satu ekosistem pengelolaan sampah lokal. Model jejaring ini menunjukkan adanya pola kolaborasi antar aktor yang bersifat horizontal dan berbasis kemitraan, bukan semata-mata hierarki birokratis.

Kebaruan kedua adalah integrasi antara regulasi formal dengan kesepakatan sosial masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh kesepakatan sosial, nilai gotong royong, dan norma lokal yang hidup di masyarakat Condongcatur. Integrasi antara aspek formal dan informal ini menjadi karakteristik khas pengelolaan sampah di tingkat kalurahan yang jarang disoroti dalam kajian kebijakan publik.

Kebaruan ketiga adalah ditemukannya praktik “sedekah sampah” sebagai bentuk inovasi lokal dalam pengelolaan sampah. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. “Sedekah sampah” menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang menggabungkan nilai sosial, keagamaan, dan lingkungan, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian partisipasi masyarakat dan inovasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperbarui konteks lokasi penelitian tetapi juga memberikan kontribusi konseptual untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas diterapkan di tingkat kelurahan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kebijakan publik dan menjadi rujukan untuk pembuatan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan *pertama*, bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur telah berjalan dan menunjukkan capaian yang cukup positif, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemilahan sampah dari rumah, keterlibatan dalam bank sampah, serta pengelolaan TPS 3R. Ditinjau dari model implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi dan disposisi pelaksana telah berjalan relatif baik, yang tercermin dari peran aktif pemerintah kalurahan dalam sosialisasi, pendampingan, dan monitoring kebijakan. Namun demikian, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait ketersediaan sarana prasarana, anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antar kelembagaan.

Kedua, Hasil evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur tergolong cukup efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun belum sepenuhnya efisien dan merata dalam menjawab permasalahan sampah di seluruh padukuhan. Sementara itu, analisis partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada level partnership, di mana masyarakat tidak hanya menerima kebijakan tetapi turut terlibat aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan program. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur telah berada

pada arah yang tepat, namun masih memerlukan penguatan implementasi agar hasil yang dicapai lebih optimal, merata, dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan formal dan praktik sosial masyarakat. Integrasi antara regulasi pemerintah kalurahan dengan inisiatif lokal, seperti pengelolaan bank sampah, TPS 3R, dan praktik sedekah sampah, menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas tidak hanya memerlukan kerangka kebijakan yang kuat, tetapi juga membutuhkan penguatan modal sosial, kelembagaan lokal, dan jejaring kolaboratif agar kebijakan dapat diterima, dijalankan, dan dipertahankan secara berkelanjutan di tingkat kalurahan.

Saran

Penguatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi lingkungan, pendampingan teknis, dan skema insentif untuk mengurangi kesenjangan partisipasi antar-padukuhan. Selain itu, pemerintah kalurahan perlu memprioritaskan optimalisasi sumber daya dan sarana prasarana pengelolaan sampah agar pelaksanaan kebijakan lebih efisien dan merata.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar-aktor perlu ditingkatkan melalui penataan struktur organisasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Dengan kelembagaan yang kuat dan mekanisme kerja yang terkoordinasi, pengelolaan sampah di Kalurahan Condongcatur diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada inisiatif individu semata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Bank, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2025*. 2018.
- [2] D. L. H. D. I. Yogyakarta, "PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN KE PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2025," no. 19, 2025.
- [3] UNEP, *Solid Waste Management and the 3Rs*. United Nations Environment Programme, 2019.
- [4] Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, "Data Timbulan Sampah Harian DIY," DLH DIY.
- [5] D. L. H. DIY, "Data Pengelolaan Sampah DIY," terasmalioboro. [Online]. Available: <https://terasalioboro.jogjapro.go.id/data-pengelolaan-sampah/>
- [6] P. D. K. S. N. 4 T. 2015, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," no. 6, pp. 1–43, 2015.
- [7] S. Pretty, "Participatory Learning for Sustainable Agriculture," *World Dev.*, vol. 23, no. 8, pp. 1247–1263, 1995.
- [8] A. S. Damanhuri dan T. Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press, 2016.
- [9] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [11] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *J. Alhadharah Ilmu Dakwah*, vol. 17 No. 33, no. 33, pp. 81–95, 2018, doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [13] W. N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Routledge, 2018.
- [14] Edward III, *Implementing Public Policy*. Edward III: Congressional Quarterly Press, 1980.
- [15] G. C. E. III, "Public Policy Implementation," *Public Adm. Rev.*, vol. 40, no. 2, pp. 124–131, 1980.

- [16] E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [17] Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- [18] Arnstein, "Ladder of Citizen Participation," *J. Am. Inst. Plann.*, vol. 4, pp. 216–224., 1969.
- [19] M. H. and M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- [20] H. K. and J. Agyeman, "Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What Are the Barriers to Pro-Environmental Behavior," *Environ. Educ. Res.*, vol. 8, no. 3, pp. 239–260, 2002.